

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS
TEKNOLOGI DI BADAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**RIZKY PRATAMA PONTOH
JOHNNY. H. POSUMAH
VERY Y. LONDA**

The need for quality public services is a must for public organizations today so that it is the responsibility of the government to be able to make adjustments in order to improve quality public services. The use of information systems in real services can be seen as to carry out service functions, this is what is meant by an information system. The purpose of this research is to find out how the Application of Technology-Based Management Information System in the Agency for Personnel and Education and Training of North Minahasa Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Informants in research are people who can provide information about research. The focus of the research is seen from the indicators according to Kumorotomo which suggests that a computer-based management information system contains elements, namely humans, hardware and software, data and procedures. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the Personnel and Education and Training Agency has the responsibility to use and implement a technology-based information system which is given the responsibility for managing the personnel system as well as education and training activities for all employees but has not been able to run and implement a technology-based information system. Limited facilities, technology systems, employee capabilities and budgetary support are the current challenges.

Keywords : *Implementation, Management Information System, Personnel Agency and Education and Training*

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan layanan publik yang berkualitas menjadi keharusan bagi organisasi publik saat ini. Hal ini disebabkan karena selain meningkatkan pemahaman masyarakat akan pola dan sistem pelayanan juga banyak berkaitan dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat. Sehingga menjadi tanggungjawab bagi pemerintah selaku pemberi layanan untuk juga mampu melakukan penyesuaian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Penggunaan sistem informasi dalam pelayanan nyata terlihat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, untuk menjalankan fungsi pelayanan maka diperlukannya rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya. Hal inilah yang

dimaksud dengan sistem informasi. Maka dari itu sudah cukup jelas bahwa setiap penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan sistem informasi secara nasional. Dengan begitu tidak lain teknologi informasi berperan besar dalam rangka pemenuhan sistem tersebut untuk skala nasional.

Kabupaten Minahasa Utara khususnya badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dan menerapkan sistem informasi berbasis teknologi. Hal ini menjadi penting karena Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sebagai organisasi perangkat daerah yang diberi tanggung jawab untuk menata sistem kepegawaian serta kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi semua pegawai yang ada di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Akan tetapi menjadi suatu pertanyaan apakah Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan telah dan mampu menjalankan dan

menerapkan sistem informasi berbasis teknologi. Keterbatasan sarana, sistem teknologi, kemampuan pegawai serta dukungan anggaran menjadi tantangan saat ini pemerintah daerah termasuk yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Fakta-fakta inilah yang menjadi dasar sehingga menimbulkan penelitian sehubungan dengan topik penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Seroan E, Posumah J. H dan Ruru J. 2018. Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 4 Nomor 63 (9-16). Penelitian terdahulu inimenjelaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam instansi yang didalamnya memerlukan informasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan Sistem Informasi Manajemen Di Dinas ini masih kurang optimal di sebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal ini menyangkut faktor teknis dan operasional yang masih kurang memadai juga didukung dengan keterbatasan anggaran yang masuk di dinas Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sebagai sarana yang ada berkaitan dengan faktor teknis, Dinas Kesehatan kabupaten minahasa selatan dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen perlu memperhatikan secara saksama dan teliti, dimana dalam hal teknis sendiri sangat membawa pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu penerapan SIM agar mampu bekerja secara optimal. Untuk faktor operasional sendiri dinas Kesehatan kabupaten minahasa selatan, dalam menerapkan sistem informasi

manajemen agar tepat sarannya, diperlukan adanya Sumber Daya Manusia yang dimaksud dengan staff atau pegawai yang memiliki keahlian dibidang komputer, yang mampu mengoprasikan komputer dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen agar dapat diterapkan dengan baik di dinas ini. Untuk faktor ekonomi diharapkan pemerintah lebih lagi melakukan pengawasan untuk ketersediaan kebutuhan sarana dan orasarana juga kebutuhan yang lain.

Abram O. O, Posumah J.H dan Palar N. 2017. Sistem Pelayanan Kesehatan Puskesmas Akelamo di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 3 Nomor 46. Dalam penelitian ini yang menjadi Fokus penelitiannya adalah sistem Pelayanan Kesehatan Puskesmas Akelamo dikecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dan dilihat dari masalah yang akan diteliti yaitu berfokus pada dimensi-dimensi Sistem Pelayanan Kesehatan Menurut Levey dan Loomb (2000) yaitu : Input, proses, output, dampak, umpan, balik. Temuan penelitian ini bahwa : a. Input, Merupakan subsistem yang memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem seperti sistem pelayanan Kesehatan. b. Proses, suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah sebuah masukan untuk menjadi hasil yang diharapkan. Saran berdasarjkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas bahwa. Sistem pelayanan Kesehatan dikecamatan sahu timur kabupaten Halmahera barat. Masih dalam tingkat tidak efektif. Karena banyak kendala-kendala dalam Sistem pelayanan Kesehatan. dalam hal ini yang harus diperhatikan. Oleh pemerintah agar dalam pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat hanya karena sarana dan prasarana. Sehingga Sistem pelayanan Kesehatan bisa berjalan dengan efektif.

Lumansik D, Lengkong F. D. J dan Planginten N. 2019. Efektivitas Sistem Birokrasi Pelayanan public di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu*

Administrasi, Vol 5 Nomor 84. Birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara memiliki misi suci yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Kondisi sekarang yang didapat di daerah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih di hadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan pada pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian dalam jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang kurang transparan, sikap petugas yang kurang responsive dan lain-lain. Sehingga menimbulkan citra buruk yang kurang baik terhadap citra pemerintah di mata masyarakatnya sendiri terutrama dimata masyarakat awam yang tidak tahu tentang birokrasi. Layanan yang diberikan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum dapat dikatakan baik dikarenakan pengelolaan dokumen-dokumen belum berjalan dengan maksimal, sistem program di capil masih sering mengalami gangguan akibatnya proses pembuatan e-ktp menjadi terhambat. Pelayanan yang di berikan masih belum dapat dikatakan baik karena pelayanan yang ada masih belum cepat tangkap akibatnya proses pelayanan publik menjadi terhambat.

Konsep Sistem Informasi Manajemen

Menurut Kumorotomo (2004 : 20), Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah

suatu perangkat manajemen yang dipergunakan untuk mendukung pihak manajemen perusahaan dalam menerima, mengolah dan mengelola perusahaan secara baik dan sistematis dengan tujuan untuk mendukung penciptaan kinerja perusahaan. Menurut Tata Sutabri (2005 : 91) sistem informasi manajemen adalah sistem manusia/mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan didalam suatu organisasi. Untuk memberikan penjelasan yang lebih terstruktur mengenai sistem informasi manajemen, maka dibawah ini dijelaskan mengenai konsep-konsep yang ada didalamnya, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sedangkan menurut Deni Darmawan (2013 : 4) sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan.

Dari uraian diatas maka suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi Bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Model umum sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana sebab sebuah sistem dapat mempunyai masukan dan keluaran. Selain itu, sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mecirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Menurut Sutabri (2005:23) informasi merupakan data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Deni Darmawan (2013 : 2), kebanyakan orang mengartikan data dan informasi dengan pengertian yang sama. Namun bagi kajian ilmiah atau bagi kaum professional, dua pengertian ini mengandung perbedaan mendasarkan. Data merujuk kepada fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu dan semacamnya. Apabila telah disaring dan diolah melalui suatu sistem pengolahan

sehingga memiliki arti dan nilai tinggi bagi seseorang maka data itu berubah fungsi menjadi informasi, yaitu : informasi merupakan hasil pengolahan data, informasi memberikan makna atau arti, dan informasi berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian.

Secara teoritis sistem informasi manajemen dapat dilaksanakan tanpa bantuan alat computer. Akan tetapi sistem manajemen yang semakin kompleks di dalam organisasi-organisasi modern, dan juga melihat kenyataan bahwa harga perangkat keras maupun perangkat lunak komputer relatif semakin murah, unsur mesin komputer tidak dapat diabaikan perannya. Secara garis besar, sistem informasi manajemen berbasis komputer mengandung unsur-unsur berikut menurut Kumorotomo (2004 : 18) :

- a. Manusia. Setiap SIM yang berbasis komputer harus memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Manusia merupakan penentu dari keberhasilan suatu SIM dan manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh SIM.
- b. Perangkat keras (*hardware*). Istilah perangkat keras merujuk kepada perkakas mesin yang terdiri dari seperangkat komputer dan perangkat pendukungnya.
- c. Perangkat lunak (*software*). Istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer berupa petunjuk-petunjuk (manual) pendukungnya. Yang disebut program komputer adalah instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras SIM berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia.
- d. Data. Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan

dipilahkan, dimodifikasi, atau diperbarui oleh program-program supaya dapat menjadi informasi.

- e. Prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer.

Konsep Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, Menyusun, menyiapkan manipulasi data dalam pembagian cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan Pendidikan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Menurut kamus Abdul Kadir (2003:13), teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama computer untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, Menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalami berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Peran teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya diperuntukan bagi organisasi, melainkan untuk kebutuhan perseorangan. Menurut Abdul Kadir (2003:15), secara garis besar peranan teknologi informasi yaitu:

- a. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan

otomasi terhadap suatu tugas atau proses.

- b. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
- c. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia.

Penerapan teknologi informasi pada tiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009:17), untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan fungsi Teknologi Informasi menurut Sutarman (2009:18) ada enam fungsi, yaitu menangkap (*capture*), mengolah (*processing*), menghasilkan (*generating*), menyimpan (*storage*), mencari kembali (*retrieval*), menyalin (*copy*) data dan informasi yang sudah tersimpan dan transmisi (*transmission*).

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian yaitu 1 orang Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Minahasa Utara, 1 orang Sekretaris Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, 2 orang Unsur Kepala Bidang di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dan 4 orang Unsur Staf di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkuman Hasil Wawancara

Sumber daya Manusia (Pegawai Pelaksana)

1. Pegawai tugaskan untuk mengoperasikan sistem manajemen kantor ada 4 pegawai yang ditugaskan khusus untuk menginput data.
2. Latar belakang Pendidikan pegawai yang ditugaskan untuk mengoperasikan sistem informasi manajemen kantor ada S.Kom, S.H, S.E dan S.Sos.
3. Pegawai tersebut telah diikutsertakan dalam Bimtek dan pemberian Diklat,
4. Tugas dari pegawai adalah menginput data kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.
5. Kendala dalam mengoperasikan sistem informasi manajemen kantor yaitu jaringannya yang lemah dan terkadang kalau ada yang akan di input berkasnya tidak lengkap.

Ketersediaan Sarana kerja

1. Ketersediaan sarana sunya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2. sarana (perangkat lunak) yang tersedia dapat digunakan dengan baik oleh pegawai karena pegawai sudah mengikuti Bimtek dan Diklat.
3. Sarana yang tersedia yaitu server, komputer maupun laptop, dan yang penting harus ada jaringan internet yang bagus.
4. Semua peralatan dikantor masih bisa digunakan dengan baik jadi tidak ada peralatan yang rusak atau pun kami paksa gunakan karna kalau ada peralatan yang rusak akan di bawah ke tempat *service* dan akan di perbaiki Kembali.
5. Proses kerja secara system telah didukung oleh data yang dibutuhkan, dan data yang diperoleh untuk digunakan dalam system informasi manajemen kantor.

Penggunaan Data

1. Data diperoleh dari setiap ASN lalu diinput dari laporan yang ada dan dari data-data kepegawaian.

2. Data yang digunakan untuk di input yang menjadi pokok yaitu data kepegawaian yang didalamnya ada nama pegawai, latar belakang studi, keluarga dan pangkat.
3. Pengelolaan data dalam waktu dekat ini ada yaitu PDM (penginputan data mandiri) jadi masing-masing pegawai yang harus menginputnya, server dan penyediaannya dari BKN dan BKPP yang menyediakan Bimtek untuk para Kasubag kepegawaian SKPD jadi semua Kembali ke pribadi masing-masing dan cara pengolahannya harus sesuai data yang dikirimkan.
4. Kendala dalam proses penginputan jaringannya yang tidak stabil dan data yang dimasukan tidak lengkap

Prosedur Kerja

1. Untuk SOP dalam pengoperasian sistem informasi manajemen kantor itu ada.
2. Program pengisian data mandiri maka kepala bidang umum untuk mengupdate data Simpeg ASN menginventarisir perubahan data masing-masing ASN berdasarkan data perubahan pada ASN yang telah di ubah dan selanjutnya menugaskan staf untuk mengetik dan mengentry data yang ada ke file Simpeg ASN.
3. Kepala bidang meneliti kembali hasil ketikan dan entry data untuk di teruskan ke kepala guna penandatanganan form, Simpeg lalu mengarsipkan form Simpeg ASN tersebut.
4. Peraturan yang berkaitan dengan penggunaan system informasi manajemen dikantor yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan BKN, dan peraturan Bupati.
5. Tidak ada peraturan yang belum di atur dalam SOP atau Peraturan penggunaan System informasi manajemen kantor karena sudah sesuai dengan aturan yang ada.

PEMBAHASAN

Penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam proses kerja suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting saat ini dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk menjalankan tugas pada pelayanan kepegawaian dan pelatihan bagi seluruh pegawai dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses yang terjadi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara dalam kajian ilmu administrasi publik. Penelitian ini menjadikan konsep dari Kumorotomo (2004) dengan unsur manusia, perangkat keras, data, prosedur sebagai pijakan teori.

Sumber daya Manusia (Pegawai Pelaksana)

Manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi. Organisasi dibentuk oleh karena adanya manusia yang bersama dalam aktivitas kerjanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, manusia yang dimaksudkan adalah pegawai yang oleh pimpinan Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara diberi tanggungjawab dalam penerapan system informasi manajemen berbasis teknologi. Manusia dalam kaitannya dengan ketersediaan pegawai baik jumlah maupun kemampuan yang dimiliki dalam mengoperasikan sistem informasi tersebut. Dari data penelitian ditemukan bahwa pegawai tugaskan untuk mengoperasikan sistem manajemen kantor ada 4 pegawai yang ditugaskan khusus untuk menginput data. Ketersediaan pegawai dalam hal jumlah ini dinilai sangat baik dan cukup untuk

menjalankan tugas dalam pengoperasian system informasi manajemen berbasis teknologi. Keberadaan pegawai dalam hal jumlah perlu juga diperhatikan atau dikaji dalam hal latar belakang pendidikan dan pengalaman. Penting dalam hal menilai latar belakang pendidikan dan pengalaman karena pegawai dalam bekerja akan juga dipengaruhi oleh kemampuan mereka.

Dari data penelitian yang diperoleh diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai yang ditugaskan untuk mengoperasikan sistem informasi manajemen kantor ada S.Kom, S.H, S.E dan S.Sos. jika dilihat dari latar belakang pendidikan ini memang hanya satu terlihat pegawai yang memiliki kemampuan system informasi berbasis teknologi yaitu yang berpendidikan sarjana komputer. Sementara tiganya tidak. Akan tetapi keempat pegawai tersebut telah diikutsertakan dalam Bimtek dan pemberian Diklat yang berkaitan dengan penggunaan dan penerapan system informasi berbasis teknologi dalam bidang kepegawaian. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh pimpinan. Sampai dengan dilakukannya penelitian, ditemukan informasi bahwa empat pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mengoperasikan sistem informasi berbasis teknologi di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara mampu menjalankan tugas dengan baik. Akan tetapi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pegawai dalam mengoperasikan system informasi kepegawaian yaitu kendala dalam mengoperasikan sistem informasi manajemen kantor yaitu jaringannya yang lemah dan terkadang kalau ada yang akan di input berkasnya tidak lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi dari unsur sumber daya manusia bukan pada jumlah pegawai ataupun kemampuan pegawai akan tetapi lebih kepada faktor lain diluar keberadaan pegawai dalam hal jumlah dan kemampuan serta keahlian. Sehingga setiap sistem informasi

manajemen yang berbasis komputer yang diberi penekanan untuk memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat telah dapat dilakukan oleh Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Manusia merupakan penentu dari keberhasilan suatu sistem informasi manajemen dan manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen telah dapat dilakukan dan terjadi di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ketersediaan Sarana Kerja

Sarana kerja dalam hal kuantitas dan kualitas akan juga menjadi penentu berhasil tidaknya suatu pekerjaan dilakukan. Pengoperasian system informasi manajemen kepegawaianpun akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana kerja yang memadai dalam hal jumlah dan kualitas sarannya. Dari wawancara yang dilakukan ditemukan data bahwa ketersediaan sarana kerja yang berhubungan dengan pengoperasian system informasi manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berkaitan dengan sarana kerja diperoleh data bahwa semua peralatan dikantor masih bisa digunakan dengan baik jadi tidak ada peralatan yang rusak. Sementara itu jikapun ada peralatan yang rusak akan di bawah ke tempat service dan akan di perbaiki kembali. Data penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sarana kerja seperti Server, Komputer maupun Laptop memerlukan juga proses perawatan. Sehingga diperlukannya anggaran yang tersedia untuk membiayai jika ada sarana kerja yang rusak atau perlu perawatan. Hal ini menjadi penting, karena empat pegawai yang ditugaskan untuk pengoperasian system informasi manajemen di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara bukanlah mekanik atau teknisi yang bertugas

memperbaiki sarana kerja. Mereka diberi tugas untuk mengoperasikan system informasi manajemen saja. Sehingga jika ada sarana kerja yang rusak maka memerlukan tenaga kerja lain yang memang memiliki keahlian dalam memperbaiki Server, Komputer maupun Laptop. Dengan adanya sarana kerja di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal sarana (perangkat Lunak) dapat digunakan dengan baik oleh pegawai karena pegawai sudah mengikuti Bimtek dan Diklat. Sehingga setiap sarana kerja yang tersedia berfungsi dan difungsikan dengan baik dalam mendukung penerapan system informasi manajemen kepegawaian. Demikian pula halnya dengan proses kerja secara system telah didukung oleh data yang dibutuhkan, dan data yang diperoleh untuk digunakan dalam system informasi manajemen kantor. Situasi yang demikian akan menjadikan pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik melalui penggunaan sarana kerja.

Pegawai yang ditugaskan untuk mengoperasikan system informasi manajemen yang berhubungan dengan kepegawaian di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara akan dapat melaksanakan tugasnya atau mulai bekerja ketika tersedia data kepegawaian yang akan diinput. Data yang digunakan untuk di input yang menjadi pokok yaitu data kepegawaian yang didalamnya ada Nama Pegawai, Latar Belakang Study, Keluarga dan pangkat. Kesemua data ini bersumber dari pegawai yang bersangkutan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam situasi yang demikian sangat nyata terlihat bahwa pegawai yang adalah operator di system informasi manajemen akan dapat bekerja ketika tersedia data yang lengkap dan benar dari setiap pegawai. Hal ini juga mempertegas bahwa bahwa betapa pentingnya data yang lengkap dari setiap pegawai untuk dimasukkan di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Minahasa Utara sehingga dapat di olah sesuai kebutuhan system informasi manajemen yang ada. Dalam upaya penginputan data saat ini pegawai operator diperhadapkan dengan kendala dalam proses penginputan jaringannya yang tidak stabil dan data yang dimasukan tidak lengkap. Kebutuhan data yang ada akan menjadi baik dan dapat digunakan dalam sistem informasi manajemen kepegawaian juga berkaitan dengan baik tidaknya system jaringan internet. Sehingga dapat dikemukakan bahwa data yang dimiliki secara tepat, benar dan sesuai dan didukung oleh sistem jaringan yang baik akan menjadikan operator dapat menjalankan fungsinya dalam sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Prosedur merupakan tata cara kerja yang dapat menjadi pedoman bagi pegawai selaku operator dalam menjalankan fungsi system informasi manajemen kepegawaian. Prosedur yang dimaksudkan yaitu yang berkaitan atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Hal yang pertama yang menjadi dasar kebijakan penerapan system informasi manajemen berbasis teknologi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kebijakan ini mengamanatkan bahwa setiap organisasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam penyelenggarannya berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem Informasi Elektronik atau Non Elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.

Sementara itu secara operasional pelaksanaan system informasi manajemen kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai

dasar pelaksanaan kerja para operator selain tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ada dalam tanggungjawab berdasarkan struktur organisasi, juga untuk SOP dalam pengoperasian sistem informasi manajemen kantor itu ada. Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara memiliki SOP yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pedoman kerja sebagaimana kebutuhan kepegawaian. Segala hal yang berhubungan dengan peraturan sebagaimana penggunaan system informasi manajemen dikantor yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan BKN, dan peraturan Bupati. Tidak ada peraturan yang belum di atur dalam SOP atau Peraturan penggunaan System informasi manajemen kantor karena sudah sesuai dengan aturan yang ada. Data ini menunjukkan bahwa pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian sehubungan dengan penerapan system informasi manajemen berbasis teknologi telah melaksanakan sesuai dengan system operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui proses penelitian yang telah dilakukan dan telah dilakukannya pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan telah dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana kerja, data dan prosedur. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana kerja, data dan prosedur menunjukkan bahwa :

1. Jumlah pegawai selaku operator saat ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi sekalipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Akan tetapi pegawai tersebut telah dibekali melalui kegiatan

pendidikan dan pelatihan sistem informasi kepegawaian.

2. Sarana kerja baik dalam jumlah maupun mutu penggunaan sangat mendukung pelaksanaan kerja. Akan tetapi ketika sarana kerja mengalami kerusakan maka diperlukan perbaikan yang berdampak pada ketersediaan anggaran dan teknisi/mekanik yang mengerti perangkat system informasi.
3. Data yang digunakan oleh operator bersumber dari pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Data yang kurang lengkap serta system jaringan internet yang kurang stabil menjadi sumber penyebab lambatnya penyelesaian kerja.
4. Pelaksanaan kerja dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis teknologi telah sesuai dengan peraturan yang ada serta didukung oleh sistem operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan diatas, maka untuk perbaikan dan penyempurnaan penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi dalam bidang kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara penelitian ini menyarankan :

1. Tetap mengikutsertakan operator sistem informasi manajemen pada setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara maupun yang berhubungan dengan kepegawaian.
2. Menyediakan anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan atau penggantian sarana kerja yang rusak.
3. Mewajibkan pegawai untuk menyiapkan data kepegawaian sesuai dengan ketentuan sebelum diserahkan kepada operator sistem dalam penginputan data.
4. Penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi dalam bidang

kepegawaian harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Adi Offset.
- Danim Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Darmawan D, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Kumorotomo. W dan S. A. Margono, 2004. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi - Organisasi Publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Moleong Lexy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Milles, M. B & Hubberma A. M, 2002. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto*. Jakarta : UI Percetakan.
- Narbuko, dkk, 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sutabri T, 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Andi.
- Sutarman, 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta
- SUMBER-SUMBER LAINNYA :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Seroan.E, Posumah.J.H dan Ruru J, 2018. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4 Nomor 63 (9-16).
- Abram, O.O, Posumah J. H dan Palar N, 2017. *Sistem Pelayanan Kesehatan Puskesmas Akelamo di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 3 Nomor 46.
- Lumansik D, Lengkong F. D. J dan Plangiten N, 2019. *Efektivitas Sistem Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 5 Nomor 84